

## **ANALISIS PENERAPAN GREEN ACCOUNTING DI PTPN III KEBUN RAMBUTAN DAN KEBUN GUNUNG PARA**

**Pipin Nurafika dan Eka Nurmala Sari**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Email: pipinnurafika12@gmail.com

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan *Green Accounting* yang dilakukan perusahaan dalam hal mengidentifikasi, mengakui, mengukur, mencatat, menyajikan dan mengungkapkan biaya pengendalian lingkungan/limbah pada laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan di PTPN III Kebun Rambutan dan Kebun Gunung Para yang memproduksi sawit dan karet serta memiliki limbah. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dan data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan mengelompokkan biaya-biaya lingkungan kemudian menganalisis, melakukan wawancara dan menyimpulkan. Hasil penelitian ini adalah PTPN III Kebun Rambutan dan Kebun Gunung Para sudah mengeluarkan biaya-biaya lingkungan dalam akuntansi perusahaannya namun tidak secara khusus melakukan identifikasi terhadap biaya-biaya lingkungan tersebut. Pengakuan terhadap biaya-biaya lingkungan diakui sebagai beban diluar beban pokok produksi. Biaya-biaya pengendalian lingkungan/limbah ini diukur dengan menggunakan satuan moneter sebesar kos yang dikeluarkan (*historical cost*) dan dicatat dengan metode *accrual basic*. Penyajian biaya lingkungan disajikan bersama biaya-biaya yang sejenis dalam laporan laba rugi dan perusahaan belum mengungkapkan informasi mengenai biaya lingkungan yang dikeluarkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

**Kata Kunci :** *Green Accounting, Biaya Lingkungan, Biaya Pengendalian Lingkungan/limbah, Laporan keuangan*

### **1. Pendahuluan**

Perkembangan perusahaan saat ini semakin pesat, sejalan dengan semakin banyaknya kebutuhan masyarakat itu sendiri. Perusahaan merupakan suatu organisasi yang melakukan kegiatan usahanya dengan menggunakan sumber daya berupa bahan baku dan tenaga kerja untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat digunakan oleh masyarakat. Perusahaan didirikan dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, akan tetapi sebagian besar perusahaan mempunyai tujuan yang sama yaitu memaksimalkan laba (Nilasari, 2014). Perusahaan yang ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya harus memperhatikan “3P (*People, Planet, dan Profit*)” atau yang dikenal dengan konsep *Tripple Bottom Line*. Selain berorientasi pada laba (*profit*), perusahaan juga wajib untuk peduli terhadap kesejahteraan masyarakat (*people*) dan berperan aktif dalam proses pelestarian lingkungan hidup (*planet*) (Wibisono, 2007 dalam Fatwadi, 2016). Pada satu sisi, aktivitas perusahaan mampu menyerap banyak tenaga kerja dan mampu menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat, akan tetapi di sisi lain aktivitas perusahaan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan karena menghasilkan limbah (Fatwadi, 2016),

Isu kerusakan lingkungan saat ini menjadi perhatian khusus masyarakat. Kerusakan lingkungan ini salah satunya dapat dihasilkan dari limbah produksi perusahaan. Dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah diartikan sebagai sisa suatu usaha atau kegiatan produksi, sedangkan pencemaran diartikan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan / atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Limbah yang dihasilkan dari operasional perusahaan memiliki kemungkinan bahwa limbah tersebut berbahaya bagi lingkungan sehingga memerlukan pengelolaan dan penanganan yang khusus oleh perusahaan agar tidak menyebabkan dampak negatif yang lebih besar terhadap lingkungan tempat perusahaan beroperasi.

Pencemaran lingkungan yang terjadi akibat proses produksi yang dilakukan disebabkan oleh perusahaan industri dan pabrik yang tidak memperhatikan pengelolaan dan penanganan limbahnya, biasanya kejadian seperti ini terjadi apabila perusahaan membuang limbahnya langsung ke sungai sehingga dampak yang dihasilkan sangat besar untuk masyarakat, seperti kasus yang dilakukan oleh empat perusahaan di bidang tekstil yang berada di Bandung, PT Gede Indah, PT Sinar Sukses Mandiri, PT Selaras Idola Abadi, PT Surya Tekstil telah mencemari sungai (DAS) Citarum dengan limbah kimia. Kemudian kasus air PDAM yang diduga sudah tercemar limbah pabrik PT Makin yang mengakibatkan ratusan warga Teluk Renda Ilir Kabupaten Tebo terserang penyakit gatal-gatal hingga bernanah (daerah.sindonews.com, Januari 2018), dan masih banyak lagi jenis pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri. Tingkat persentase pencemaran lingkungan dari tahun ke tahun juga semakin meningkat khususnya pencemaran air sungai, seperti yang dikatakan oleh Kasi Pengendalian Pencemaran Air Rumah Tangga Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan RI, Winoto bahwasanya berdasarkan sampel sungai di Indonesia yang mereka kaji, 75% tercemar berat. Sementara kontribusi limbah domestik di beberapa sungai besar di atas 60% (menlh.go.id, 2017).

Dalam pengelolaan limbah produksi, perusahaan perlu menerapkan *green accounting* atau akuntansi lingkungan untuk mendukung kegiatan operasional terutama dalam pengelolaan limbah produksi. Saat ini di Indonesia pengungkapan mengenai akuntansi lingkungan masih belum diatur secara khusus dalam standar akuntansi, artinya pelaporan informasi lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan masih bersifat sukarela. Akan tetapi IAI secara implicit menjelaskan bahwa laporan tahunan harus mengakomodasi kepentingan para pengambil keputusan (Hadi, 2012 dalam Mulyani, 2013). Dijelaskan dalam PSAK No.1 Tahun 2009, paragraf 9 yang menyatakan: “Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*Value added Statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

Konsep *green accounting* sudah mulai berkembang sejak tahun 1970-an di Eropa, diikuti mulai berkembangnya penelitian-penelitian yang terkait dengan isu *green accounting* tersebut di tahun 1980-an. Di negara-negara maju seperti yang ada di Eropa dan Jepang, perhatian akan isu-isu lingkungan ini berkembang pesat baik secara teori maupun praktik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peraturan terkait dengan lingkungan ini (Himawan, 2016). Akuntansi lingkungan adalah suatu istilah yang berupaya untuk mengelompokkan pembiayaan yang dilakukan perusahaan dan pemerintah dalam melakukan konvensi lingkungan ke dalam pos lingkungan dan praktik bisnis perusahaan (Suartana, 2010 dalam Yuliantini 2017). Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya (*environmental cost*), dan manfaat atau efek (*economic benefit*), serta menghasilkan efek perlindungan lingkungan (*environmental protection*) (Ikhsan, 2008).

Pencemaran dan limbah produksi merupakan salah satu contoh dampak negatif dari kegiatan operasional perusahaan yang memerlukan sistem akuntansi lingkungan sebagai kontrol terhadap tanggung jawab perusahaan. Pengelolaan limbah yang dilakukan oleh perusahaan tersebut memerlukan pengukuran, penilaian, pengungkapan dan pelaporan biaya pengelolaan limbah dari hasil kegiatan operasional perusahaan. Penerapan *green accounting* juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar biaya lingkungan yang dikeluarkan dalam mengelola limbah tersebut dengan menggunakan sistem akuntansi sehingga dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan, dapat mengontrol tanggung jawab perusahaan dalam menjaga lingkungan sekitar perusahaan, serta dapat membuat laporan biaya lingkungan untuk dijadikan suatu pedoman manajemen dalam pengambilan keputusan.

## **2. Landasan Teori**

### **2.1. Pengertian Green Accounting**

Akuntansi merupakan ilmu yang dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungannya. Seiring

dengan perkembangan masa dimana kepedulian terhadap lingkungan mulai mendapat perhatian masyarakat, maka muncul wacana akuntansi sosial dan akuntansi lingkungan yang pada akhirnya memunculkan konsep *Socio Economic Environmental Accounting (SEEC)* yang merupakan penjelasan singkat pengertian *Triple Bottom Line* (Wiedmann dan Manfred, 2006) yang merupakan pelaporan akuntansi pada publik mencakup kinerja ekonomi, kinerja lingkungan serta kinerja sosial. SEEC ini merupakan perluasan wacana dari *Corporate Social Responsibility*. Jadi tidak sekedar mengelola permasalahan-permasalahan sosial seperti sumber daya manusia baik internal maupun eksternal seperti masyarakat, masalah sosial lain seperti beasiswa pendidikan, kepedulian sosial lainnya tetapi juga mengelola permasalahan lingkungan dan penyebab kerusakannya.

Green Accounting atau yang sering juga disebut dengan akuntansi lingkungan (*Environment Accounting*) merupakan praktek menggabungkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan dan konservasi ke dalam praktek pelaporan yang meliputi analisa biaya dan manfaat. Akuntansi lingkungan adalah identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya-biaya lingkungan hidup dan pengintegrasian biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan usaha serta mengkomunikasikan hasilnya kepada para stockholders perusahaan (Astuti, 2002 dalam Wahyudi, 2012). Akuntansi lingkungan dalam *Environmental Accounting Guidelines (EAG, 2005)* didefinisikan sebagai berikut: “*Environmental accounting, as defined in these guidelines, aims at achieving sustainable development, maintaining a favorable relationship with the community, and pursuing effective and efficient environmental conservation activities. These accounting procedures allow a company to identify the cost of environmental conservation during the normal course of business, identify benefit gained from such activities, provide the best possible means of quantitative measurement (in monetary value or physical units) and support the communication of its results*”.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dijelaskan bahwa akuntansi lingkungan merupakan pengelompokan biaya yang dilakukan perusahaan dalam melakukan konservasi lingkungan ke dalam praktik bisnis perusahaan. Kegiatan konservasi lingkungan ini akan memunculkan biaya lingkungan yang harus ditanggung oleh pihak perusahaan. Akuntansi lingkungan juga dapat dianalogikan sebagai suatu kerangka kerja pengukuran yang kuantitatif terhadap kegiatan konservasi lingkungan yang dilakukan perusahaan. Konsep akuntansi lingkungan mulai berkembang sejak tahun 1970-an. Pada tahun 1990-an, *IASC (The International Accounting Standards Committee)* mengembangkan konsep tentang prinsip akuntansi internasional, termasuk di dalamnya pengembangan akuntansi lingkungan. *AICPA (American Institute Of Certified Public Accountant)* juga mengeluarkan prinsip-prinsip universal tentang audit lingkungan.

## **2.2. Sejarah dan Perkembangan Green Accounting**

Di Eropa konsep green accounting ini sudah mulai berkembang sejak tahun 1970-an, dimulai dari Norwegia yang terpengaruh dengan publikasi *Limits to Growth* (Meadows et al . 1972) dan gerakan lingkungan yang berkembang. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup Norwegia mengembangkan statistik untuk pengukuran sumber daya alam sebagai alat bantu yang lebih baik dalam mengelola sumber daya alamnya. Dimana ada ketakutan bahwa sumber daya alam mereka akan habis dikarenakan eksploitasi yang berlebihan. Lalu isu lingkungan ini juga mendapat perhatian pemerintah Denmark sebagai akibat adanya krisis minyak tahun 1973 yang mulai membuat perhitungan cadangan energy dan penghematannya. Pada tahun 1980-an, Prancis mengembangkan sistem akuntansi untuk menilai baik secara kuantitatif maupun kualitatif keadaan dan perubahan atas sumberdaya alamnya (Vanoli 2005:344). Dari Belanda Roefie Hueting, yang mengembangkan dan berusaha untuk menerapkan ukuran pendapatan nasional berkelanjutan yang memperhitungkan perubahan dan penurunan aset lingkungan yang disebabkan kegiatan ekonomi. Kalau kita lihat upaya-upaya yang dilakukan pada tahap awal ini di beberapa Negara memiliki kesamaan dimana hanya terfokus untuk memperoleh gambaran data fisik dari penggunaan sumber daya alam.

Pada era tahun 1990-an *International Accounting Standards Committee (IASC)*

pengembangan konsep tentang prinsip-prinsip akuntansi internasional yang meliputi pengembangan akuntansi lingkungan. Dan seiring meningkatnya standar industri yang diikuti berkembangnya auditor profesional seperti American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) mengeluarkan prinsip-prinsip universal tentang audit lingkungan. PBB lewat Coalition for Environmental Economies (CERES) dan UNEP pada tahun 1997, mengeluarkan Global Reporting Initiative (GRI), yang merupakan panduan pelaporan perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. GRI yang sampai dengan saat ini telah mengalami pembaharuan, isi pokoknya dapat dibagi menjadi enam bagian meliputi : ekonomi, lingkungan hidup, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak, tanggung jawab produk, dan masyarakat. Kemudian pada tahun 2000 Kementerian Lingkungan Hidup Jepang mengeluarkan Environmental Accounting Guidelines yang kemudian disempurnakan pada tahun 2002 dan 2005, dimana semua perusahaan di Jepang diwajibkan menggunakan akuntansi lingkungan.

### **2.3. Tujuan Penerapan Akuntansi Lingkungan**

Menurut Ikhsan (2008), maksud dan tujuan dikembangkannya akuntansi lingkungan antara lain meliputi:

1. Sebagai alat manajemen lingkungan, akuntansi lingkungan digunakan untuk menilai keefektifan kegiatan konservasi berdasarkan ringkasan dan klasifikasi biaya konservasi lingkungan. Data akuntansi lingkungan juga digunakan untuk menentukan biaya fasilitas pengelolaan lingkungan, biaya keseluruhan konservasi lingkungan dan juga investasi yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan. Selain itu, akuntansi lingkungan juga digunakan untuk menilai tingkat keluaran dan capaian tiap tahun guna menjamin perbaikan kinerja lingkungan yang harus berlangsung terus menerus.
2. Sebagai alat komunikasi dengan publik, akuntansi lingkungan digunakan untuk menyampaikan dampak negatif lingkungan, kegiatan konservasi lingkungan dan hasilnya kepada publik. Tanggapan dan pandangan terhadap akuntansi lingkungan dari para pihak, pelanggan dan masyarakat digunakan sebagai umpan balik untuk merubah pendekatan perusahaan dalam pelestarian atau pengelolaan lingkungan.

Di dalam akuntansi lingkungan ada beberapa komponen pembiayaan yang harus dihitung, misalnya:

- a. Biaya operasionalisasi bisnis yang terdiri dari biaya depresiasi fasilitas lingkungan, biaya memperbaiki fasilitas lingkungan, jasa atau pembayaran (*fee*) kontrak untuk menjalankan fasilitas pengelolaan lingkungan, biaya tenaga kerja untuk menjalankan operasionalisasi fasilitas pengelolaan lingkungan serta biaya kontrak untuk pengelolaan limbah (*recycling*).
- b. Biaya daur ulang yang dijual, atau biasa juga disebut dengan “*Cost Incurred by upstream and down-stream business operations*”.
- c. Biaya penelitian dan pengembangan (Litbang) yang terdiri dari biaya total untuk material dan tenaga ahli, tenaga kerja lain untuk pengembangan material yang ramah lingkungan, produk dan fasilitas pabrik.

### **2.4. Pentingnya Akuntansi Lingkungan**

Akuntansi lingkungan dapat mendukung akuntansi pendapatan, akuntansi keuangan maupun bisnis internal akuntansi manajerial. Fokus utamanya didasarkan pada penerapan akuntansi lingkungan sebagai suatu alat komunikasi manajerial untuk pengambilan keputusan bisnis internal. Panduan yang menjadi tolak ukur pentingnya akuntansi lingkungan berkaitan dengan pertanggungjawaban akuntansi lingkungan itu sendiri. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau *United State Environment Protection Agency (US EPA)* dalam ikhsan (2008), peran akuntansi lingkungan adalah:

“*Suatu fungsi penting tentang akuntansi lingkungan adalah untuk menggambarkan biaya-biaya lingkungan supaya diperhatikan oleh para stakeholders perusahaan yang mampu mendorong dalam pengidentifikasian cara-cara mengurangi atau menghindari biaya-biaya ketika*

pada waktu yang bersamaan sedang memperbaiki kualitas lingkungan”.

Akuntansi lingkungan menjadi hal yang penting untuk dapat dipertimbangkan dengan sebaik mungkin karena akuntansi lingkungan merupakan bagian akuntansi atau sub bagian akuntansi. Alasan yang mendasarinya adalah mengarah pada keterlibatannya dalam konsep ekonomi dan informasi lingkungan.

## **2.5. Fungsi dan Peran Akuntansi Lingkungan**

Fungsi dan peran akuntansi lingkungan (Ikhsan, 2008) dibagi ke dalam dua bentuk yaitu:

1. Fungsi Internal
2. Fungsi Eksternal

## **2.6. Perbedaan Akuntansi Konvensional dengan Akuntansi Lingkungan**

Akuntansi konvensional menurut Craig & Ben Gorgon (2001) dalam Rossje (2006) memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi entitas akuntansi
- 2) Mengaitkan aktivitas ekonomi dari entitas akuntansi
- 3) Mencatat kejadian ekonomi (economic events)
- 4) Hanya diperuntukkan secara khusus untuk investor dan lainnya yang berkepentingan dengan entitas akuntansi (*Stockholder*).

Sedangkan karakteristik akuntansi lingkungan adalah:

- a) Mengidentifikasi kejadian ekonomi, sosial, dan lingkungan
- b) Entitas akuntansi
- c) Memperhatikan dampak kejadian ekonomi, sosial, dan lingkungan demi kelangsungan hidup organisasi perusahaan
- d) Menghasilkan informasi untuk para stakeholder seperti masyarakat, publik, karyawan atau buruh, generasi akan datang.

## **2.7. Sifat Dasar Akuntansi Lingkungan**

Sifat dasar akuntansi lingkungan (Fasua, 2011) diuraikan sebagai berikut:

- 1) Relevan
- 2) Handal
- 3) Mudah Dipahami
- 4) Dapat dibandingkan
- 5) Dapat Dibuktikan

## **2.8. Biaya Lingkungan**

Biaya lingkungan dapat disebut sebagai biaya yang muncul dalam usaha untuk mencapai tujuan seperti pengurangan biaya lingkungan yang meningkatkan pendapatan, meningkatkan kinerja lingkungan yang perlu dipertimbangkan saat ini dan yang akan datang. Biaya lingkungan juga didefinisikan oleh Susenohaji, (2003) dalam Jaya (2015) sebagai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan berhubungan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan perlindungan yang berlaku. Biaya lingkungan mencakup baik biaya internal (berhubungan dengan pengurangan proses produksi untuk mengurangi dampak lingkungan) maupun eksternal (berhubungan dengan perbaikan kerusakan akibat limbah yang ditimbulkan). Biaya lingkungan juga didefinisikan oleh Hansen dan Mowen (2007) sebagai biaya-biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk mungkin terjadi. Maka, biaya lingkungan berhubungan dengan kreasi, deteksi, perbaikan, dan pencegahan degradasi lingkungan. Sebelum informasi biaya lingkungan dapat disediakan bagi manajemen, biaya-biaya lingkungan harus didefinisikan.

Definisi biaya lingkungan menurut *Environmental Protection Agency (EPA)* antara lain:

- a. Biaya lingkungan meliputi biaya-biaya dari langkah yang diambil, atau yang harus diambil untuk mengatur dampak-dampak lingkungan terhadap aktifitas perusahaan dalam

- cara pertanggungjawaban lingkungan yang disesuaikan dengan tujuan-tujuan lingkungan dan keinginan perusahaan.
- b. Biaya-biaya lingkungan meliputi biaya internal dan eksternal dan berhubungan terhadap seluruh biaya-biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan kerusakan lingkungan dan pengendalian.
  - c. Biaya-biaya lingkungan adalah pemakaian sumber daya disebabkan atau dipandu dengan usaha-usaha (aktifitas) untuk:
    - 1) Mencegah atau mengurangi barang sisa dan polusi;
    - 2) Mematuhi regulasi lingkungan dan kebijakan perusahaan;
    - 3) Kegagalan memenuhi regulasi dan kebijakan lingkungan.

## **2.9. Tahapan Perlakuan Alokasi Biaya Lingkungan**

Sebelum mengalokasikan pembiayaan untuk pengelolaan dampak lingkungan seperti pengelolaan limbah, pencemaran lingkungan, pencemaran udara, pencemaran suara dan efek sosial lainnya, perusahaan perlu merencanakan tahap pencatatan pembiayaan tersebut. Tahap-tahap ini dilakukan agar dalam pengalokasian anggaran yang telah direncanakan untuk satu periode akuntansi dapat diterapkan dengan efektif dan efisien. Pencatatan pembiayaan untuk mengelola sampah-sampah yang dikeluarkan dari hasil sisa produksi suatu usaha dialokasikan dalam tahap-tahap tertentu yang masing-masing tahap memerlukan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tahap-tahap pencatatan itu dapat dilakukan sebelum periode akuntansi berjalan sesuai dengan proses produksi yang dilakukan perusahaan tersebut (Hadi, 2012 dalam Pertiwi, 2017).

Pencatatan untuk mengelola segala macam yang berkaitan dengan limbah sebuah perusahaan didahului dengan perencanaan yang akan dikelompokkan dalam pos-pos tertentu sehingga dapat diketahui kebutuhan riil setiap tahunnya. Pengelompokkan dalam tahap analisis biaya lingkungan adalah sebagai berikut:

## **2.10. Identifikasi**

Dalam akuntansi lingkungan pada umumnya menggunakan kata-kata seperti penuh (*full*), total (*total*), dan siklus hidup (*life cycle*). Istilah tersebut lebih cenderung menggunakan pendekatan tradisional dimana lingkup biaya melebihi biaya-biaya lingkungan. Biaya lingkungan menurut (Susenohaji dalam Jaya, 2015) adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya pemeliharaan dan pergantian dampak akibat limbah dan gas buangan
- 2) Biaya pencegahan dan pengelolaan lingkungan
- 3) Biaya pembelian bahan baku hasil produksi
- 4) Biaya pengolahan untuk produk.

## **2.11. Kerangka Berpikir**

Kebun Rambutan dan kebun Gunung para adalah dua komoditi usaha di PTPN III Persero dengan kegiatan operasionalnya menggunakan sumber daya alam, dimana dalam setiap kegiatan menghasilkan produk pasti menghasilkan limbah. Limbah diartikan sebagai sisa suatu usaha atau kegiatan produksi, limbah yang dihasilkan dari operasional perusahaan memiliki kemungkinan bahwa limbah tersebut berbahaya bagi lingkungan. Maka dari itu diperlukannya penerapan green accounting sebagai salah satu cara perusahaan menjaga eksistensi perusahaannya dengan tidak hanya menguntungkan profit tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan.

Green accounting ini adalah jenis akuntansi yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan ke dalam hasil kegiatan usaha perusahaan. Biaya lingkungan adalah jenis biaya yang dikorbankan saat ini untuk mendapat manfaat di masa depan dalam hal pelestarian lingkungan. Biaya-biaya lingkungan ini memiliki beberapa tahapan berikut untuk mengontrol pengelolaan biaya-biaya lingkungan, seperti melakukan identifikasi biaya-biaya lingkungan dengan

menentukan jenis biaya yang akan dikeluarkan, kemudian menganalisis pengakuan terhadap biaya lingkungan dan melakukan pengukuran. Setelah dilakukan pengukuran terhadap biaya hal selanjutnya adalah menganalisis metode yang digunakan dalam mencatat biaya biaya lingkungan tersebut. Biaya-biaya yang timbul dalam pengelolaan lingkungan ini berikutnya akan disajikan dan diungkapkan didalam laporan keuangan. Dan dari semua tahapan yang dilakukan, maka dianalisis kesesuaiannya dengan PSAK No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2003 :54). Penelitian deskriptif ini menentukan dan melaporkan keadaan sekarang. Tujuan utama dari penelitian deskriptif ini merupakan gambaran yang secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

### **4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **A. Identifikasi dan Komponen Biaya Lingkungan**

Pada dasarnya, biaya lingkungan selalu berhubungan dengan biaya produk, proses, sistem atau fasilitas penting untuk pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik. Penggambaran biaya lingkungan pada perusahaan itu tergantung dari niat perusahaan itu sendiri untuk menggunakan informasi yang dihasilkan dari informasi biaya lingkungan. Biaya lingkungan merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan akibat kerusakan lingkungan. Hal ini juga diungkapkan oleh Staff Tata Usaha/ finance PKS Rambutan dan PPK Gunung Para bahwasanya:

#### **B. Pembahasan**

##### **Identifikasi Biaya Lingkungan dan Komponen yang Termasuk di Dalamnya**

PTPN III Kebun Rambutan dan Kebun Gunung Para merupakan unit kebun yang memproduksi sawit dan karet, dalam melaporkan biayanya untuk pengelolaan limbah dan pengendalian lingkungan diakui dalam pos biaya umum kebun.

Setelah melakukan penelitian berdasarkan bukti-bukti yang ada terkait terkait pengelolaan lingkungan maka dalam hal pengelolaan lingkungan hidup PKS Rambutan dan PPK Gunung Para dalam mengelola limbahnya sudah sesuai dengan AMDAL dan sudah mengacu pada UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga mengacu pada PP No.41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, KEPMENLH No. KEP-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kesehatan Industri, walaupun masih terdapat pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar, PKS Rambutan dan PPK Gunung Para sudah memenuhi tanggung jawab dengan memberikan biaya ganti rugi yang disebut dengan biaya sosial. Kemudian terkait dengan biaya-biaya lingkungan yang terdapat pada PKS Rambutan dan PPK Gunung Para, dapat diketahui bahwa PKS Rambutan dan PPK Gunung Para sudah mengeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan dengan kegiatan lingkungannya. Tetapi biaya-biaya tersebut belum diidentifikasi secara khusus oleh masing-masing pabrik.

##### **1. Mengakui Biaya Lingkungan**

Setiap awal periode, masing-masing unit menerima rencana biaya yang telah ditetapkan untuk periode satu tahun berdasarkan rata-rata realisasi anggaran periode sebelumnya. Akan tetapi, pada dasarnya kas tersebut masih berbentuk alokasi anggaran (rencana biaya) yang masih belum dapat disebut sebagai biaya, karena pembiayaan untuk pengendalian lingkungan/limbah tersebut dilakukan setiap bulan dan pada akhir periode akuntansi akan dijumlahkan untuk dilaporkan pada laporan keuangan.

##### **2. Mengukur Biaya Lingkungan**

PKS Rambutan dan PPK Gunung Para dalam mengukur biaya pengendalian

lingkungan/limbah menggunakan satuan moneter sebesar biaya yang dikeluarkan. Biaya tersebut diambil dari rata-rata realisasi periode sebelumnya atau sering disebut dengan metode *historical cost*. Pengukuran biaya pengendalian lingkungan/limbah dilakukan dengan menentukan besarnya jumlah rupiah yang akan dialokasikan pada suatu pos terkait dengan masing-masing jenis pengendalian lingkungan yang dilakukan agar dapat diketahui seberapa besar jumlah yang akan dikurangkan dari rencana biaya dalam setiap awal periode. Walaupun belum ada peraturan yang mengatur pengukuran biaya lingkungan terkait pengelolaan limbah, perusahaan dapat menggunakan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal tersebut sejalan dengan definisi yang diungkapkan oleh Suwardjono mengenai pengukuran. Berikut ini pengertian pengukuran menurut Suwardjono dan masing-masing pabrik

**Tabel.1. Pengukuran Biaya Lingkungan**

Pengukuran Menurut Suwardjono	Pengukuran Menurut PKS Rambutan dan PPK Gunung Para
Menurut Suwardjono pengukuran ( <i>measurement</i> ) adalah penentuan angka atau satuan pengukur terhadap suatu objek untuk menunjukkan makna tertentu dari objek tersebut. Pada umumnya, perusahaan mengukur biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengelolaan lingkungan dengan menggunakan satuan moneter yang sudah ditetapkan sebelumnya dan sebesar yang dikeluarkan. Sehingga akan diperoleh jumlah dan nilai yang tepat sesuai kebutuhan riil perusahaan setiap periode.	Dalam mengukur biaya lingkungan perusahaan menggunakan satuan moneter berdasarkan kos yang dikeluarkan dan diambil dari realisasi anggaran periode sebelumnya.

Sumber : Diolah Peneliti

### 3. Pencatatan

Pencatatan yang dilakukan oleh PKS Rambutan dan PPK Gunung Para menggunakan metode *accrual basic*, dimana biaya yang diakui dan dicatat jika suatu kegiatan atau transaksi terjadi dalam kegiatan operasional perusahaan tanpa memperhatikan kas diterima maupun kas dikeluarkan. Keunggulan dari metode ini adalah beban diakui saat terjadi transaksi sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya walaupun kas belum dikeluarkan atau diterima. Metode ini banyak digunakan perusahaan-perusahaan besar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dimana mengharuskan suatu perusahaan menggunakan metode akrual ini.

### 4. Menyajikan Biaya Lingkungan

Standar Akuntansi Keuangan per 1 Januari 2009, PSAK No 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mengungkapkan dalam paragraf 07, mengenai komponen Laporan Keuangan dinyatakan bahwa:

*“Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini: Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.”*

Berikut akan disajikan perbandingan penyajian biaya lingkungan menurut Haryono dengan masing-masing pabrik.

**Tabel.2. Perbandingan Penyajian Biaya Lingkungan**

Model Penyajian Menurut Haryono	Model Penyajian Menurut Pabrik
---------------------------------	--------------------------------

1	Model Normatif	Biaya lingkungan disajikan secara keseluruhan dalam satu ruang lingkup rekening perusahaan secara umum bersama biaya lain yang sejenis.
	Model ini mengakui dan mencatat biaya-biaya lingkungan secara keseluruhan yakni dalam lingkup satu ruang rekening secara umum bersama rekening lain yang serumpun. Biaya-biaya serumpun tersebut disisipkan dalam sub-sub unit rekening biaya tertentu dalam laporan keuangannya	
2	Model Hijau	
	Model ini menetapkan biaya dan manfaat tertentu atas lingkungan bersih.	
3	Model Intensif Lingkungan	
	Model ini menetapkan pengeluaran akan disajikan sebagai investasi atas lingkungan sedangkan aktiva terkait lingkungan tidak didepresiasi	
4	Model Aset Nasional	
	Selain memperdulikan lingkungan dalam pengungkapannya secara akuntansi, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk menginterpretasikan pembiayaan lingkungan tersebut sebagai aset nasional	

Sumber : Diolah Peneliti

### **5. Mengungkapkan Biaya Lingkungan**

Sehubungan dengan biaya lingkungan dalam hal pengolahan limbah masuk ke dalam perhitungan beban di luar beban pokok produksi, PKS Rambutan dan PPK Gunung Para tidak mengungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan tentang kebijakan akuntansi yang diambil dan diterapkan oleh pabrik yang berkaitan dengan masalah pembebanan biaya limbah ke biaya umum kebun dan masuk ke dalam beban di luar beban pokok produksi. Masing-masing pabrik hanya membuat evaluasi terhadap anggaran jika terjadi kenaikan atau melebihi anggaran yang ditentukan, dan untuk Catatan Atas Laporan keuangan dibuat oleh kantor Pusat. Namun, kantor pusat tidak membuat Catatan Atas Laporan Keuangan mengenai biaya lingkungan ini. Kantor Pusat hanya menjelaskan Pengendalian Lingkungan/limbah yang dilakukan perusahaan di Laporan Tahunan Tahun Buku tanpa memuat biaya-biaya yang terkait.

Ditinjau dari pemberian informasi akuntansi, maka pengungkapan informasi lingkungan adalah untuk mengkomunikasikan antara seluruh transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan dengan pemakainya untuk pertimbangan ekonomis dan keputusan investasi yang rasional. Informasi yang disampaikan di Catatan Atas Laporan Keuangan sudah dapat menggambarkan secara relevan, dan dapat diandalkan, karena informasi yang ada sudah mencakup masalah kuantitatif atas biaya yang telah dan akan dikeluarkan sehubungan dengan *environmental expenditure* maupun informasi kualitatif tentang kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan.

Oleh karena itu, informasi yang dibuat oleh perusahaan dapat mencerminkan aktivitas perusahaan yang menyeluruh tentang usaha pengelolaan lingkungan hidup. Dan dari pengungkapan tersebut dapat memberikan kepuasan bagi *stakeholder* karena dapat mempertimbangkan keputusan investasi yang akan dilakukan serta lebih cepat untuk mengetahui permasalahan yang timbul selama periode tertentu. PKS Rambutan dan PPK Gunung Para sebaiknya mengungkapkan kebijakan tersebut dalam Catatan Atas Laporan Keuangan mengenai dimasukkannya biaya lingkungan ke dalam laporan keuangan untuk mengkomunikasikan seluruh transaksi yang terjadi dalam perusahaan untuk mengungkapkan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah dilakukan dan yang sedang berjalan sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan

### **5. Kesimpulan Dan Saran**

#### **Kesimpulan**

Dari pembahasan yang diuraikan dalam bab 4 (empat) berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang akan dicapai maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Definisi biaya lingkungan menurut perusahaan adalah biaya-biaya yang timbul dan berkaitan untuk menanggulangi dampak lingkungan baik untuk pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh operasional perusahaan maupun dampak sosial akibat kegiatan operasional perusahaan. Pengertian ini sejalan dengan pengertian yang dijelaskan menurut Susenohaji dimana biaya lingkungan diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan berhubungan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan perlindungan yang dilakukan.
- 2) PKS Rambutan dan PPK Gunung Para dalam Pengelolaan Lingkungan sudah mengacu Pada AMDAL dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No.41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, dan KEPMENLH No. KEP-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kesehatan Industri, dan dalam penanganan pencemaran lingkungan yang terjadi sudah melakukan tanggung jawab sosial dengan memberikan ganti rugi kepada masyarakat dan lingkungan.
- 3) PKS Rambutan dan PPK Gunung Para sudah mengeluarkan biaya-biaya lingkungan dalam akuntansi perusahaannya namun tidak secara khusus melakukan identifikasi biaya lingkungan yang terjadi seperti yang telah diidentifikasi oleh Susenohaji dan Hansen & Mowen.
- 4) PKS Rambutan dan PPK Gunung Para mengakui biaya-biaya lingkungan yang terjadi sebagai beban diluar beban pokok produksi. Biaya lingkungan dianggarkan pada awal periode dan diakui pada saat biaya tersebut digunakan untuk operasional pengelolaan lingkungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Anne dalam artikelnya.
- 5) Pengukuran yang dilakukan masing-masing pabrik adalah dengan menggunakan satuan moneter yang sebesar yang dikeluarkan perusahaan dan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya. Metode ini disebut dengan *historical cost*. Hal tersebut sesuai dengan definisi yang diungkapkan oleh Suwardjono terkait pengukuran.
- 6) Pencatatan yang dilakukan PKS Rambutan dan PPK Gunung Para adalah dengan menggunakan metode *accrual basic*. Dimana biaya yang diakui dan dicatat jika suatu kegiatan atau transaksi terjadi dalam kegiatan operasional perusahaan tanpa memperhatikan kas diterima maupun kas dikeluarkan.
- 7) Dalam penyajian biaya-biaya lingkungan, PKS Rambutan dan PPK Gunung Para menyajikan dengan Model Normatif. Dimana model ini mengakui dan mencatat biaya-biaya lingkungan secara keseluruhan yakni dalam lingkup satu ruang rekening secara umum bersama rekening lain yang serumpun. Biaya-biaya tersebut masuk dalam beban diluar beban pokok produksi dalam sub biaya umum kebun. Karena biaya tersebut dikatakan sebagai biaya umum atau administrasi, bukan dicatat sebagai biaya produksi yang dapat mengalokasikan biaya tersebut dalam sub beban pokok produksi.
- 8) Informasi yang berkaitan dengan biaya pengelolaan lingkungan belum diungkapkan di catatan atas laporan keuangan.

### **Saran**

Dari kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

- 1) PKS Rambutan dan PPK Gunung Para:
  - a. Pabrik sebaiknya mengklasifikasikan biaya lingkungan yang lebih rinci seperti identifikasi yang dilakukan Susenohaji atau Hansen dan Mowen agar dapat mengontrol biaya yang dikeluarkan oleh pabrik serta lebih memudahkan dalam pengambilan keputusan.
  - b. Perusahaan sebaiknya menyempurnakan laporan keuangan yang telah ada sebelumnya, seperti contoh yang telah dibuat agar dapat memberikan informasi yang lebih akurat bagi pengguna laporan keuangan.
  - c. Sebaiknya pabrik mengungkapkan terkait kebijakan-kebijakan akuntansi mengenai biaya-biaya lingkungan agar jelas pengalokasian biaya yg ditimbulkan.
- 2) Peneliti selanjutnya:
  - a. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat membahas penerapan *green accounting* secara

menyeluruh serta menambahkan sisi manajemen.

- b. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menemukan standar pengukuran biaya lingkungan agar dapat diperbandingkan dengan kondisi perusahaan.

## Referensi

- Abdalah, Yousif Abdelbagi (2014). "Social and Environmental Accounting Research: The Way Forward". *International Journal of Economics and Management*. Vol. 8, No.2, hal 365- 383.
- Adhitya Hilmawan (2016). "Akuntansi Lingkungan Dinilai Mampu Tingkatkan Laba Perusahaan". <https://m.suara.com/bisnis/2016>. Diakses 25 November 2017.
- Bangun, Rilen Ninda (2013). "Pelaporan Biaya Lingkungan dan Penilaian Kinerja Lingkungan". *Jurnal Program Studi Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Dewi, Santi Rahma (2016). "Pemahaman dan Kepedulian Penerapan Green Accounting: Studi Kasus UKM Tahu di Sidiarjo". *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis*. FEB UMSIDA.
- Dina, Farah (2016). "Pengaruh Aktivitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013". *Skripsi*. Universitas Lampung.
- Eka Nurmala Sari dan Elizar Sinambela .2008. Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Perkebunan di Sumatera Utara), *JRAB: Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 8(2). Hal. 1-21.2008
- Environmental Accounting Guidelines (2005). *Ministry of the Environment*. Japan. Februari 2005.
- Fatwadi, dkk (2016). "Voluntary Report Berbasis Green Accounting". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Universitas Mataram. Vol: 7, No: 3, Hal: 370-387. Desember 2016.
- Hansen, Don. R. And Mowen, Maryanne M. (2007). *Management Accounting, 8<sup>th</sup> edition*. South western-thomson learning.
- Haryanti, Andi, dkk (2014). "Studi Pemanfaatan Limbah Padat Kelapa Sawit". *Jurnal Konversi*. Universitas Mulawarman Samarinda. Vol: 3, No: 2. Oktober 2014.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2009). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikhsan, Arfan (2008). *Akuntansi Lingkungan dan Penerapannya*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ikhsan, Arfan (2009). *Akuntansi Manajemen Lingkungan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Jaya, Hendra (2015). "Analisis Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan Terhadap Laba Perusahaan PT. Imeco Batam Tubular". *Jurnal Measurement*. Vol: 9, No: 1. Maret 2015.
- Juliandi, Azuar, dkk (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan : Umsupress.
- Kementerian Lingkungan Hidup. "Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan." <https://proper.menlh.go.id/portal/>. Diakses pada 17 Januari 2018
- Kusumaningtias, Rohmawati (2013). "Green Accounting, Mengapa dan Bagaimana". *Proceeding Seminar Nasional Dan Call For Paper Sancall*. Maret 2013.
- Latief (2016). "Biaya Lingkungan Dongkrak Laba Perusahaan?". <https://edukasi.kompas.com>. Diakses pada 25 November 2017.
- Lindrianasari (2007). "Hubungan antara Kinerja Lingkungan dan Kualitas Pengungkapan Lingkungan dengan Kinerja Ekonomi Perusahaan di Indonesia". *JAAI*. Vol: 11, No: 2.
- Martdian Ratna Sari (2016). "Green Business to Green Accounting". <https://swa.co.id>. Diakses pada 25 November 2017.
- Medan Bisnis (2016). "Air Limbah PTPN3 Sisumut Cemari Danau Taruntung". <https://www.mdn.biz.id/n/209006>. Diakses pada 25 November 2017.
- Mulyani, Nita Sri (2013). "Analisis Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan Pada Pabrik Gondorukem dan Terpentin (PGT)". *Skripsi*. Universitas Jember.
- Musyarofah, Siti (2013). "Analisis Penerapan Green Accounting di Kota Semarang". *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Nilasari, Fitri (2014). "Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah". *Artikel Ilmiah Mahasiswa*. Universitas Jember.
- Pertiwi,Siska Ayu Intan (2017). "Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah (Studi Kasus Pada Pabrik Gula Semboro)". *Skripsi*. Universitas

Muhammadiyah Jember.

Sindonews (2018). “Kumpulan Kasus Pencemaran Lingkungan yang disebabkan Oleh Perusahaan Industri”. <https://daerah.sindonews.com>. Diakses pada 17 Januari 2018.

Sr. M. Maximiliana (2016). “Selamatkan Lingkungan dengan Green Accounting”. <https://jpicofmindonesia.com>. Diakses pada 25 November 2017.

Widarti, Budi Nining, dkk (2015). “Degradasi COD Limbah Cair Dari Pabrik Kelapa Sawit Dalam Proses Pembentukan Biogas”. *Jurnal Integrasi Proses*. Vol: 5, No: 3. Desember 2015.

Yuliantini, Putu Anik, dkk (2017). “Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Unit Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di Badan Usaha Milik Desa”. *e-journal SI Ak*, Universitas Pendidikan Ganesha. Vol: 7, No. 1